



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

e-klipping

*Kumpulan Berita Harian Media Online
(ePaper)*

SUBJEK

POLITIK

Selasa, 10 September 2024

BIRO HUMAS, KEARSIPAN DAN TATA USAHA PIMPINAN
Perpustakaan
2024

Daftar Isi

1. KERJA SAMA GLOBAL UNTUK MASA DEPAN DUNIA – *Media Online Kompas*
2. COUNTRIES TURN TO NEIGHBORS FOR IDEAS ON SDGs – *Media Online The Jakarta Post*

Kerja Sama Global untuk Masa Depan Dunia

Antonio Guterres

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa

Negosiasi akhir saat ini sedang berlangsung di New York, Amerika Serikat, untuk penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Masa Depan pada bulan ini, saat para kepala negara akan menyetujui reformasi terhadap fondasi kerja sama global.

PBB menyelenggarakan KTT unik ini karena fakta yang jelas: masalah-masalah global bergerak lebih cepat daripada institusi-institusi yang dirancang untuk menyelesaikannya.

Kita melihat ini di mana-mana. Konflik dan kekerasan yang hebat menyebabkan penderitaan yang mengerikan; perpecahan geopolitik merajalela; ketidakteraturan dan ketidakadilan terjadi di mana-mana, mengikis kepercayaan, memperburuk keluhan, dan menyuburkan populisme dan ekstremisme.

Tantangan klasik seperti kemiskinan, kelaparan, diskriminasi, misogini, dan rasisme sedang mengambil bentuk baru.

Sementara itu, kita menghadapi ancaman baru dan eksistensial, mulai dari kekacauan iklim yang tak terkendali hingga degradasi lingkungan, serta teknologi seperti kecerdasan buatan yang berkembang dalam kekosongan etika dan hukum.

KTT Masa Depan mengakui bahwa solusi untuk semua tantangan ini ada di tangan kita. Namun, kita membutuhkan pembaruan sistem yang hanya dapat disampaikan oleh para pemimpin global.

Pengambilan keputusan internasional terjebak dalam pusaran waktu. Banyak institusi dan alat global adalah produk dari tahun 1940-an—era sebelum globalisasi, sebelum dekolonisasi, sebelum pengakuan luas terhadap hak asasi manusia

dan kesetaraan jender, sebelum umat manusia bepergian ke luar angkasa—apalagi dunia maya.

Para pemenang Perang Dunia II masih memegang posisi utama di Dewan Keamanan PBB hingga saat ini, sementara seluruh Benua Afrika tidak memiliki kursi tetap.

Arsitektur keuangan global sangat berat sebelah terhadap negara-negara berkembang dan gagal memberikan jaring pengaman ketika mereka menghadapi kesulitan, membuat mereka terjebak dalam utang, yang menguras dana dari investasi untuk rakyat mereka.

Dan institusi global memberikan ruang yang terbatas bagi banyak pemain besar di dunia saat ini—mulai dari masyarakat sipil hingga sektor swasta. kaum muda yang akan mewarisi masa depan hampir tak terlihat, sementara kepentingan generasi mendatang tidak terwakili.

Pesannya jelas: kita tidak dapat menciptakan masa depan yang layak untuk cucu-cucu kita dengan sistem yang dibangun untuk kakek-nenek kita. KTT Masa Depan akan menjadi kesempatan menghidupkan kembali kolaborasi multilateral yang sesuai dengan abad ke-21.

Agenda Baru

untuk Perdamaian

Solusi yang kami usulkan mencakup Agenda Baru untuk Perdamaian yang berfokus pada pembaruan institusi dan alat internasional untuk mencegah dan mengakhiri konflik, termasuk Dewan Keamanan PBB.

Agenda Baru untuk Perdamaian menyerukan dorongan baru untuk membersihkan dunia kita dari senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lain-

nya; serta memperluas definisi keamanan untuk mencakup kekerasan berbasis jender dan kekerasan geng.

Ini memperhitungkan ancaman keamanan di masa depan, dengan mengakui perubahan sifat peperangan dan risiko mempersenjatai teknologi baru. Sebagai contoh, kita memerlukan kesepakatan global untuk melarang senjata otonom mematikan yang dapat mengambil keputusan hidup atau mati tanpa intervensi manusia.

Institusi keuangan global harus mencerminkan dunia saat ini dan dilengkapi untuk memimpin tanggapan yang lebih kuat terhadap tantangan saat ini: utang, pembangunan berkelanjutan, aksi iklim.

Ini berarti langkah-langkah konkret untuk mengatasi tekanan utang, meningkatkan kapasitas pinjaman bank pembangunan multilateral, dan mengubah model bisnis mereka sehingga negara-negara berkembang memiliki akses yang jauh lebih besar pada pembiayaan swasta dengan suku bunga yang terjangkau.

Tanpa pembiayaan tersebut, negara-negara berkembang tidak akan mampu mengatasi ancaman terbesar di masa depan kita: krisis iklim. Mereka sangat membutuhkan sumber daya untuk beralih dari bahan bakar fosil yang merusak planet ini ke energi bersih dan terbarukan.

Dan seperti yang disoroti oleh para pemimpin tahun lalu, reformasi terhadap arsitektur keuangan global juga menjadi kunci untuk memulai kembali kemajuan yang sangat dibutuhkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Fokus KTT

KTT ini juga akan fokus pada teknologi baru dengan dampak global, mencari cara untuk menutup kesenjangan digital dan menetapkan prinsip-prinsip bersama untuk masa depan digital yang terbuka, bebas, dan aman bagi semua.

Kecerdasan buatan (AI) adalah teknologi revolusioner dengan aplikasi dan risiko yang baru mulai kita pahami.

Kami telah mengajukan proposal spesifik agar pemerintah, bersama dengan perusahaan teknologi, akademisi, dan masyarakat sipil, bekerja pada kerangka kerja manajemen risiko untuk AI serta memantau dan mengurangi dampaknya, serta berbagi manfaatnya.

Tata kelola AI tidak bisa dibiarkan kepada negara-negara kaya; semua negara harus berpartisipasi, dan PBB siap menyediakan platform untuk menyatukan semua pihak.

HAM dan kesetaraan jender adalah benang merah yang menghubungkan semua proposal ini. Pengambilan keputusan global tak dapat direformasi tanpa menghormati semua HAM dan keberagaman budaya, serta memastikan partisipasi penuh dan kepemimpinan perempuan dan anak perempuan. Kami menyerukan upaya baru untuk menghilangkan hambatan historis—hukum, sosial, dan ekonomi—yang mengecualikan perempuan dari kekuasaan.

Para pembangun perdamaian tahun 1940-an menciptakan institusi yang membantu mencegah Perang Dunia III dan memimpin banyak negara dari kolonisasi menuju kemerdekaan. Namun, mereka tak akan mengenali lanskap global saat ini.

KTT Masa Depan adalah kesempatan untuk membangun institusi dan alat kerja sama global yang lebih efektif dan inklusif, selaras dengan abad ke-21 dan dunia multipolar kita. Saya mendesak para pemimpin untuk meraihnya.

Rubrik ini menerima artikel dengan topik aktual, relevan dan menyangkut kepentingan publik. Artikel hanya dikirim ke Opini Kompas. Panjang artikel maksimal 5.000 karakter dengan spasi. Kirim ke www.kompas.id/kirim-opini

Hlm: 6 - Kolom: Opini

Countries turn to neighbors for ideas on SDGs



By **Jong-Jin Kim**
Bangkok

Assistant director general and FAO regional representative for Asia and the Pacific

South-South Cooperation (SSC) has increasingly been recognized as one of the most efficient and effective means of exchanging technical know-how and experiences between countries of Asia and the Pacific.

Unlike the traditional "donor country-beneficiary country" relationships, South-South Cooperation is more like a collaboration between countries and has significantly evolved as a proven method for one country in Asia and the Pacific to learn from another that has overcome similar developmental challenges in its own recent history.

Indeed, the United Nations and other multilateral development partners have increased their focus on SSC as an important complementary modality to bridge the technological gap in support of sustainable development and eradicating poverty, inequalities and, most notably, hunger.

SSC is underpinned by several principles which make it a highly desirable form of technical cooperation. These include mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty, mutual non-aggression, mutual noninterference, equality and mutual benefit and peaceful coexistence.

The Food and Agriculture Organization (FAO) of the UN recognizes SSC as based on solidarity among partner countries for mutual benefits, whereby FAO plays a catalytic role in facilitating cooperation among countries and institutions that have proven development solutions to share with countries in need of such solutions.

Given its competitive advantage, FAO has provided a framework for such cooperation, reflecting its international experience in SSC initiatives, particularly to help drive an agrifood systems transformation for the benefit of all people in the Asia-Pacific region, and worldwide.

It is important to emphasize the fact that SSC is not a replacement for North-South cooperation, which is highly significant and beneficial in and of itself, but rather complementary in its approaches.

The main difference is SSC provides know-how, training, and knowledge exchange, rather than providing development assistance in the form of monetary grants. In any case, both are important.

The Asia-Pacific region is home to some of the world's most cutting-edge technologies that have significantly con-

tributed to poverty alleviation and reducing hunger. However, at the same time, the region is home to the world's largest concentration of extremely poor and malnourished people.

This anomaly is also reflected in the technologies among different countries in the region. Some have developed highly sophisticated technologies across value chains, while others are struggling with very basic and primitive technologies in the same region.

Less developed countries have historically been more interested in learning from countries who had faced similar challenges not long ago.

Given this developed/underdeveloped mix of countries, the SSC approach is a logical neighbor-to-neighbor initiative in Asia and the Pacific. But given that the region has accumulated a rich and diverse set of experiences in strategies and policies related to rural poverty, agricultural development, prices, trade and institutional development,

it can and does share its know-how with countries in other parts of the world.

Other countries within and outside the region are quite keen to know such recipes for success, adopt and adapt them, and build on successful experiences.

Ultimately, SSC allows countries, not only to understand the results of successful experiences and effective technical know-how, but also the processes and mechanisms involved in their development, implementation and institutionalization.

While the middle-income countries in Asia and the Pacific have accumulated significant experiences and technical know-how in their own agrifood systems, some may not have access to the required financial means to facilitate the exchange with other countries.

In this regard, FAO has been approaching other development partners to participate in envisaged technical cooperation. This is referred to as South-South and Triangular Cooperation (SSTC), where a third party provides financial resources to facilitate the exchange.

At the end of the day—or more to the point at the end of this decade—there is much work to be done to meet the Sustainable Development Goals (SDG). On the International Day for South-South Cooperation on Sept. 12, let's remember that SSC and North-South assistance can both help this region—and the world—achieve those goals.

SSC is not a replacement for North-South cooperation, which is highly significant and beneficial in and of itself, but rather complementary in its approaches.